



Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Meika Purnamasyari, SE

198805302022032003

Latsar JF PSM Angkatan X Tahun 2023

Optimalisasi Saran dari Penguji



Presentasi Rancangan Implementasi

**Pengumpulan Data Potensi Wilayah
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

**Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah**

di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Agenda



01. Pendahuluan

Latar Belakang

02. Implementasi Penggerakkan Masyarakat

Jadwal Implementasi

03. Hasil Pengolahan Data

Analisis Hasil Pengumpulan
Data

04. Hasil Implementasi

Analisis USG

05. Penutup

Rekomendasi Aksi
Perubahan

LATAR BELAKANG



Permenpan RB
No 28 Tahun 2018

JF PSM

Tugas PSM:

Pengembangan Komitmen Perubahan;
Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
Peningkatan Kemandirian Masyarakat.



Permendes
No 1 Tahun 2020

Standar & Ujikom
JF PSM

Fungsi PSM:

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
desa melalui pergerakan keswadayaan
masyarakat untuk mencapai kemandirian
yang berkelanjutan



- 64,2 Juta UMKM
- 97% Total Tenaga Kerja
- 60,4% Total Inventasi
- 61,07% (Rp 8.573,89 T) PDB

Sumber: Kemenkop UKM

UMKM Mendukung Peningkatan Ketahanan Ekonomi



- 1 Menyediakan jaringan pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi



- 2 Membentuk produk domestik bruto



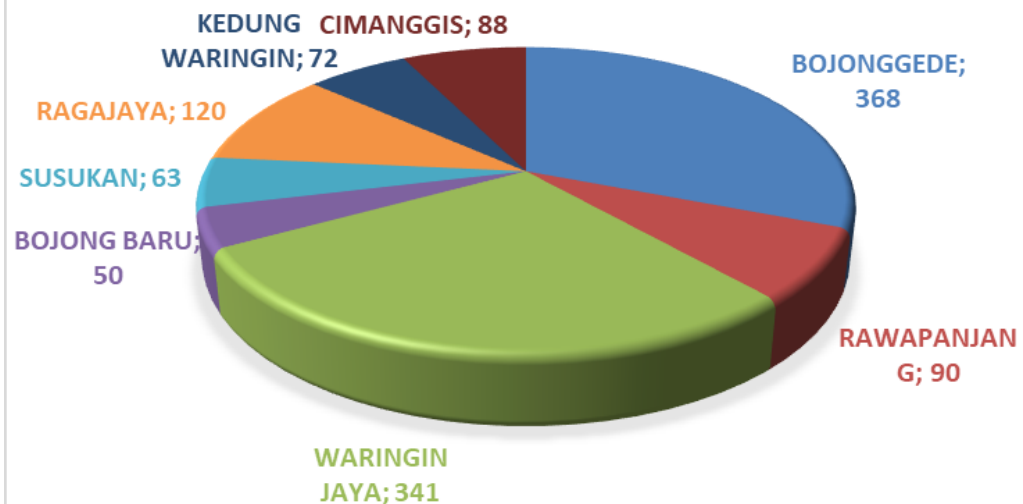
- 3 Memperluas penyerapan dan kesempatan kerja



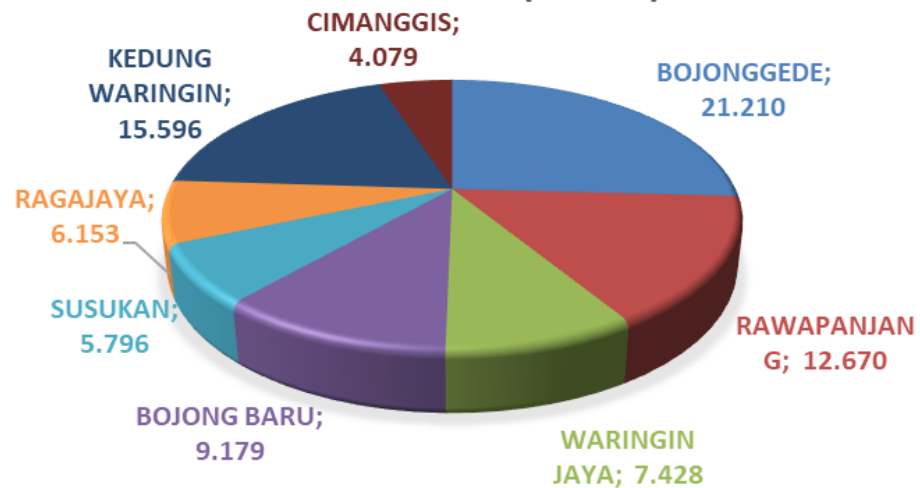
- 4 Menciptakan lowongan pekerjaan

Kecamatan Bojonggede

UMKM KECAMATAN BOJONGGEDE



KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN BOJONGGEDE (PER KM²)



JADWAL IMPLEMENTASI

7 – 18 Sep

Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data

1. Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder
2. Membuat dan Menguji Coba Google Form



29 Sep – 3 Oct

Analisis Data



19 – 27 Sep

Pengumpulan Data UMKM

1. Sosialisasi Instrumen Pengumpulan Data
2. Monitoring Pengumpulan Data

4 – 10 Oct

Evaluasi

1. Konsultasi Hasil Pengolahan Data
2. Menyusun Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat

DAFTAR PERTANYAAN GOOGLE FORM

DAFTAR PERTANYAAN GOOGLE FORM	
1	Email Address
2	KECAMATAN
3	NAMA UMKM / NAMA USAHA
4	TAHUN MULAI BERDIRI
5	BENTUK USAHA
6	JENIS USAHA
7	JENIS USAHA (UNTUK CEKLIS LAINNYA)
8	NAMA PENGUSAHA
9	TEMPAT LAHIR / TANGGAL LAHIR (PERHATIKAN PENGISIAN)
10	PENDIDIKAN
11	ALAMAT SESUAI KTP
12	ALAMAT USAHA
13	NOMOR NIK
14	NOMOR KONTAK HP (DIUTAAMAKAN YANG BISA WHATSAAP)
15	PRODUK YANG DIHASILKAN
16	EMAIL (isi menggunakan huruf kecil atau sesuai dengan alamat email)
17	ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM USAHA
18	STATUS TEMPAT USAHA
19	USAHA YANG DIJALANKAN
20	PERKEMBANGAN USAHA
21	DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI (PKP, WUB, Halal, Desain Kemasan, atau kosongkan jika belum)
22	PAMERAN YANG PERNAH DIIKUTI (kosongkan jika belum pernah)
23	LEMBAGA INSTANSI YANG MEMBINA
24	NOMOR NIB/IUMK
25	MODAL PERTAMA SENDIRI (isi dengan nominal)
26	MODAL SEKARANG SENDIRI (isi dengan nominal)
27	ASET SEKARANG (isi dengan nominal)
28	TOTAL ASET / KEKAYAAN SEKARANG (isi dengan nominal)
29	OMZET/TAHUN PERTAMA (isi dengan nominal)
30	OMZET/TAHUN SEKARANG (isi dengan nominal)
31	MODAL LUAR
32	KETERANGAN
33	TANGGAL LAHIR
34	JUMLAH MODAL LUAR (untuk yang ceklis ada)
35	MODAL PERTAMA DARI LUAR (isi jika ada dengan nominal)
36	ASET PERTAMA (isi dengan nominal)
37	OMZET/TAHUN PERTAMA (isi dengan nominal)
38	MODAL SEKARANG DARI LUAR (isi jika ada dengan nominal)

ANALISIS DATA

BENTUK USAHA



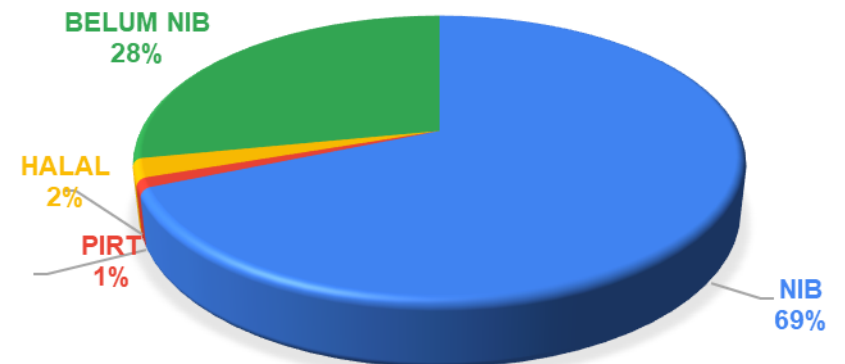
JENIS USAHA



PERINDUSTRIAN



IJIN INDUSTRI MAKANAN MINUMAN



ANALISIS PRIORITAS DENGAN METODE USG

NO	ISU	KRITERIA			TOTAL	PERINGKAT
		U	S	G		
1	Pemasaran	5	3	4	12	1
2	Keuangan	4	3	4	11	2
3	Izin Usaha	3	3	3	9	4
4	Operasional	3	3	4	10	3



Digitalisasi Pemasaran UMKM merupakan salah satu kegiatan peningkatan keterampilan UMKM dalam mengelola bisnis dengan mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

“

Keuntungan DIGITALISASI PEMASARAN bagi pelaku UMKM adalah:

1. Menjangkau Pasar Lebih Luas;
2. Lebih Profesional;
3. Menekan Biaya Operasional;
4. Dapat Mengatur Budget Pemasaran.



Mengoptimalkan Digitalisasi UMKM

Riset Pasar

- mengetahui produk apa yang paling laris terjual

Riset Kompetitor

- mempelajari strategi pemasaran yang tepat untuk produk serta mempertahankan loyalitas pelanggan

Cari Supplier Berkualitas

- Menyediakan barang yang berkualitas penting untuk menjaga loyalitas pelanggan.

Perkuat Brand

- Membuat logo dan nama toko yang unik.
- Buatlah juga sosial media *brand* sebagai media untuk berkomunikasi dengan pelanggan maupun calon pembeli.

Memasarkan Produk Secara Online

- Membuat sosial media juga bertujuan untuk mempermudah pemasaran. Anda bisa melakukan pemasaran organik melalui *post* dan *story* promosi melalui Facebook dan Instagram secara gratis.

Penutup

Implementasi Penggerakkan Masyarakat

Sudah dilaksanakan sesuai rancangan implementasi

Pribadi

Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh ketika Latsar JF PSM

Rekomendasi Aksi Perubahan

Digitalisasi UMKM untuk mendukung ketahanan ekonomi, dengan prioritas Digitalisasi Pemasaran UMKM

Rencana Tindak Lanjut

1. Pelatihan dilanjut Pembimbingan 1 bulan
2. Implementasi dilakukan di seluruh wilayah kecamatan
3. Koordinasi bersama DiskopUKM



Terimakasih ^^

Meika Purnamasyari, SE

Latsar JF PSM Angkatan X 2023



LAPORAN IMPLEMENTASI PENGGERAKAN MASYARAKAT

PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA
BOJONGGEDE KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Disusun oleh :

Nama : Meika Purnamasyari
NIP : 198805302022032003
Jabatan : PSM Ahli Pertama
Unit Kerja : Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

PELATIHAN DASAR JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT ANGKATAN X

PUSAT PELATIHAN PEGAWAI ASN

KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PENGGERAKAN MASYARAKAT

**“Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bojonggede Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor”**

Nama : Meika Purnamasyari
NIP : 198805302022032003
Jabatan : PSM Ahli Pertama
Unit Kerja : Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Jakarta, Oktober 2023

Mengetahui,
Coach



Rusdiana Yuliarti, S.Si, M.S.M.
NIP. 198607222009122002

Menyetujui,
Mentor



Suradi Supriyadi, S.Sos. MM
NIP. 196904061991011001

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PENGGERAKAN MASYARAKAT

**“Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bojonggede Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor”**

Nama : Meika Purnamasyari
NIP : 198805302022032003
Jabatan : PSM Ahli Pertama
Unit Kerja : Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

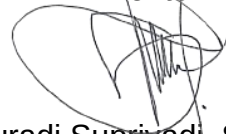
Jakarta, Oktober 2023

Mengetahui,
Coach



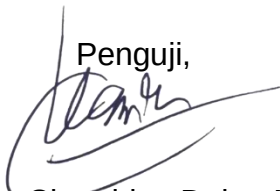
Rusdiana Yuliarti, S.Si, M.S.M.
NIP. 198607222009122002

Menyetujui,
Mentor



Suradi Supriyadi, S.Sos. MM
NIP. 196904061991011001

Penguji,



DR. Ir. Chamidun Daim, MBA
NIP. 195910121984031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Implementasi Penggerakan Masyarakat ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kegiatan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi di tempat kerja. Penulisan Laporan Implementasi Penggerakan Masyarakat ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si. selaku Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN;
2. Bapak Suradi Supriyadi, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojonggede sekaligus mentor;
3. Ibu Rusdiana Yuliarti, S.Si, M.S.M., selaku coach dalam kegiatan Implementasi;
4. Bapak DR. Ir. Chamidun Daim, MBA selaku penguji dalam Seminar Implementasi;
5. Fasilitator dan Panitia selama kegiatan Latihan Dasar;
6. Keluarga atas dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Rancangan Aktualisasi;
7. Teman-teman Latsar JF PSM Angkatan X Tahun 2023.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan berharap masukan dari berbagai pihak agar menjadi lebih baik, semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Jakarta, ... Oktober 2023
Penyusun

Meika Purnamasyari, SE
NIP. 198805302022032003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	5
1.2.1 Tujuan	5
1.2.2 Manfaat	5
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II PROFIL INSTANSI DAN WILAYAH	7
2.1 Profil Instansi	7
2.1.1 Sejarah Instansi	7
2.1.2 Visi dan Misi	8
2.2 Identifikasi Potensi Wilayah	9
2.3 Metode dan Analisis Pengumpulan Data	10
BAB III RANCANGAN IMPLEMENTASI PENGGERAKKAN MASYARAKAT	13
3.1 Rancangan Kegiatan	13
3.2 Rencana Jadwal	14
3.3 Kendala dan Antisipasi	15
BAB IV LAPORAN IMPLEMENTASI PENGGERAKKAN MASYARAKAT	13
4.1 Jadwal Implementasi Kegiatan	13
4.2 Deskripsi Implementasi Kegiatan	17
4.2.1 Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM	17
4.2.2 Pengumpulan Data UMKM	19
4.2.3 Analisis Data	21
4.2.4 Evaluasi	23
4.3 Hasil Implementasi Kegiatan	25
4.4 Kendala dan Solusi	30
BAB V PENUTUP	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Rencana Tindak Lanjut	33
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Bojonggede	6
Tabel 2.1 Penentuan Prioritas dengan Menggunakan Metode USG	11
Tabel 3.1. Matriks Rancangan Kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat	13
Tabel 3.2. Rencana Jadwal Kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat..	14
Tabel 3.3. Kendala dan Antisipasi Kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) No. 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) mengatur tentang peran dan tanggung jawab PSM dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Tugas PSM sesuai dengan Permenpan RB No. 28 Tahun 2018 antara lain:

1. Menggerakkan Swadaya Masyarakat

PSM bertugas untuk menggerakkan, memfasilitasi, dan membina swadaya masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Mereka harus mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan proyek pembangunan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

PSM harus memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk organisasi-organisasi swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan mereka dalam mengelola dan memecahkan masalah-masalah lokal. Ini mencakup memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan teknis.

3. Pendampingan Masyarakat

PSM bertugas mendampingi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengembangkan rencana tindakan. Mereka harus membantu masyarakat dalam menyusun proposal-proposal proyek, mengakses sumber daya yang diperlukan, dan mengelola anggaran dengan efektif.

4. Koordinasi dengan Pihak Terkait

PSM juga memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam rangka mendukung pergerakan masyarakat. Mereka harus memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan yang memungkinkan dalam pelaksanaan program dan proyek.

5. Monitoring dan Evaluasi

PSM harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan proyek yang melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

6. Pengembangan Kapasitas Diri

PSM juga memiliki tugas untuk terus mengembangkan kapasitas diri mereka sendiri. Mereka harus aktif dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung peran mereka sebagai penggerak swadaya masyarakat.

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

PSM harus membuat laporan atas semua kegiatan yang mereka lakukan dan harus dapat bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya yang mereka kelola dalam rangka penggerakan masyarakat.

Tugas ini mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat kemandirian lokal. Salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bisnis masyarakat yang utama dalam kegiatan perekonomian. Mereka merupakan pemercepat dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Usaha mikro kecil selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai bisnis pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan memungkinkan dihimpunnya penerimaan negara berupa pajak. Peran dan fungsi strategis ini, sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan memerankan UMKM sebagai salah satu pelaku usaha komplementer bagi pengembangan perekonomian nasional (Christiana, Pradhanawati, & Hidayat, 2014).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan perekonomian. UMKM di desa dapat meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, memperkecil angka pengangguran di desa, pemererat rasa kebersamaan, mengembangkan

potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.

Dalam konteks ini, UMKM dapat membantu meningkatkan ketahanan perekonomian di desa dengan cara:

1. Meningkatkan pendapatan: UMKM dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai jenis usaha seperti pertanian, kerajinan tangan, dan sebagainya.
2. Memberdayakan masyarakat: UMKM dapat membantu masyarakat desa untuk memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Memperkecil angka pengangguran: UMKM dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat memperkecil angka pengangguran di desa.
4. Mempererat rasa kebersamaan: UMKM dapat membantu mempererat rasa kebersamaan antara masyarakat desa dan meningkatkan solidaritas sosial.
5. Mengembangkan potensi masyarakat: UMKM dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat desa dan meningkatkan kreativitas mereka dalam menciptakan produk-produk baru.
6. Mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya: UMKM dapat membantu mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya di desa sehingga dapat berkembang lebih pesat.
7. Menumbuhkan rasa ingin maju: UMKM dapat menumbuhkan semangat dan rasa ingin maju pada masyarakat desa sehingga mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan hasil pendataan dan survei lapangan yang dilakukan oleh penulis, Desa Bojonggede memiliki UMKM potensial berupa usaha yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Namun dalam kegiatan pemasaran pelaku usaha masih melakukan secara konvensional seperti dititipkan pada toko maupun menerima pesanan dari pihak tertentu, dan dalam pemanfaatan strategi branding juga belum optimal. Sehingga lingkup pemasaran masih terbatas menjadikan usaha

yang dijalankan belum dapat berkembang dengan baik. Sebagian besar usaha dilakukan pada bidang industri makanan minuman dengan jenis yang variatif.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Industri Makanan Minuman yang ada di Desa Bojonggede dalam pengembangan usahanya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk.

Beberapa permasalahan diatas inilah yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bogor agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UMKM ini perlu untuk dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan potensi yang ada, diperlukan sebuah rancangan implementasi penggerakan masyarakat yang komprehensif. Program ini akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pembangunan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan positif dalam memajukan kehidupan di wilayah mereka. Dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan rancangan implementasi penggerakan masyarakat ini akan membawa dampak positif yang signifikan khususnya bagi UMKM Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan alasan tersebut, maka penulis menyusun Implementasi Penggerakkan Masyarakat dengan judul **“Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”**

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

- a. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk mewujudkan PNS yang professional dan berkarakter khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat.
- b. Mengoptimalkan jejaring yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- c. Merekomendasikan rencana aksi yang dapat meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

1.2.2. Manfaat

- a. Bagi Penulis
 - Meningkatnya pemahaman dan kemampuan untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
 - Identifikasi terhadap potensi wilayah, mempermudah penulis mengetahui prioritas kegiatan Penggerakkan masyarakat yang akan dilakukan.
- b. Bagi Instansi
 - Terwujudnya visi dan misi di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
 - Meningkatnya citra instansi karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, sehingga mendapat respon positif dari berbagai pihak dan kalangan.
- c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

1.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penguatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Dengan adanya kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat yang fokus di sektor UMKM diharapkan dapat turut serta berkontribusi dalam pengembangan usaha yang sudah ada di Desa Bojonggede.

Kegiatan yang dilakukan pada implementasi ini meliputi Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Evaluasi. Pelaksanaan implementasi penggerakkan masyarakat dilaksanakan mulai 7 September s.d 10 Oktober 2023 dengan lingkup Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Perekonomian Masyarakat melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN WILAYAH

2.1. Profil Instansi

Dalam tinjauan ini berisi tentang sejarah Kecamatan Bojonggede, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi dari masing – masing bagian yang ada dalam Instansi pemerintahan di Kecamatan Bojonggede.

2.1.1. Sejarah Instansi

Kecamatan Bojonggede merupakan salah satu kecamatan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Raya Bojong Gede No. 316 ,dengan luas wilayah Kecamatan 315 Ha.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Kecamatan Bojonggede

Kecamatan Bojonggede mempunyai luas tanah 2500 m2 dengan luas Gedung 700 m2 (2Lt). Sampai dengan tahun 1981 Bojong Gede hanya merupakan nama salah satu desa di kecamatan Depok, baru pada tahun 1982, Depok menjadi Kota Administratif, dan Bojonggede yang pada saat itu merupakan desa yang lebih menonjol dibandingkan dengan desa – desa lainnya ditetapkan menjadi kemandren

Bojonggede atau cikal bakal kecamatan Bojonggede, Selanjutnya bersamaan dengan 2 kecamatan lainnya di kabupaten Bogor yaitu kecamatan Caringin dan Kecamatan Nanggung, Bojonggede resmi menjadi Kecamatan dengan camat pertamanya Sudaryo dan sekarang posisi camat menjadi Edy Suwito SP. AP, Msi.

Kecamatan Bojong Gede terbagi menjadi 9 Kelurahan dan Desa yaitu Kelurahan Pabuaran, Desa Bojong Baru, Desa Bojonggede, Desa Cimanggis, Desa Kedung Waringin, Desa Ragajaya, Desa Rawa Panjang, Desa Susukan, dan yang terakhir Desa Waringin Jaya.

Batas wilayah :

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Cipayung
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tanah Sereal dan Kecamatan Sukaraja
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tajur Halang dan Kecamatan Kemang

2.1.2. Visi dan Misi

Visi

“Bojonggede Menuju Daerah Pemukiman dan Jasa yang Maju”

Misi

1. Meningkatkan pelayanan publik dan kapasitas pemerintahan desa.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat serta prasarana dan sarana wilayah.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta kesholehan sosial dalam lingkungan yang kondusif.

2.2 Identifikasi Potensi Wilayah

Wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan perekonomian. Kecamatan Bojonggede terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah ini memiliki aksesibilitas yang cukup baik ke pusat kota Bogor dan wilayah sekitarnya, sehingga memudahkan perdagangan dan pertukaran barang dan jasa.

Masyarakat di Kecamatan Bojonggede memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Mereka memiliki keterampilan tradisional dalam pertanian dan kerajinan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Melalui kemitraan dengan pihak terkait. Kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat menjadi faktor penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini termasuk dukungan teknis, akses ke pasar yang lebih luas, dan investasi dalam infrastruktur.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bojonggede dapat melibatkan pengembangan UKM lokal. Pendampingan dalam pengelolaan usaha, akses ke pembiayaan mikro, dan promosi produk lokal dapat membantu meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, keterlibatan aktif masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dan kerja sama dengan berbagai pihak, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bojonggede dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Desa Bojonggede merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Bojonggede. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Publikasi Kecamatan Bojonggede dalam Angka Tahun 2023, Desa Bojonggede merupakan Desa terpadat di Kecamatan Bojonggede dengan Kepadatan Penduduk sebesar 21.210 orang per KM².

2.3 Metode dan Analisis Pengumpulan Data

Laporan ini menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) yang merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial, terutama dalam konteks pedesaan atau wilayah yang terpencil. RRA adalah metode yang relatif cepat dan murah untuk mendapatkan pemahaman awal tentang situasi, masalah, dan potensi suatu komunitas atau wilayah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan RRA:

1. **Observasi Langsung:** Tim penelitian melakukan kunjungan langsung ke wilayah yang akan diteliti. Mereka mengamati berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam komunitas tersebut.
2. **Wawancara Informal:** Tim penelitian berbicara dengan anggota komunitas secara informal. Ini bisa terjadi saat kunjungan lapangan, pertemuan kelompok, atau percakapan sehari-hari dengan penduduk setempat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan dari perspektif mereka.
3. **Pertemuan Kelompok:** Tim penelitian dapat mengadakan pertemuan kelompok dengan berbagai segmen masyarakat seperti petani, wanita, pemuda, atau tokoh masyarakat. Ini membantu dalam memahami pandangan yang berbeda dan dinamika dalam komunitas tersebut.
4. **Peta Partisipatif:** Dalam beberapa kasus, penggunaan peta partisipatif dapat membantu dalam menunjukkan aspek geografis dan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Komunitas dapat ikut serta dalam membuat peta ini.
5. **Kuesioner Sederhana:** RRA juga bisa mencakup penggunaan kuesioner sederhana, meskipun ini lebih umum dalam pendekatan RRA yang lebih terstruktur.

Setelah itu, pengolahan data dilakukan menggunakan Teknik Urgent Serious Growth (USG), yaitu sebuah metode untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu:

- **Urgency:** seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani, terkait dengan waktu yang tersedia dan tekanan yang timbul jika tidak segera diselesaikan.

- **Seriousness:** seberapa serius dampak masalah tersebut terhadap situasi dan kondisi yang ada, terkait dengan akibat yang muncul jika tidak segera diselesaikan atau kemungkinan menimbulkan masalah lain.
- **Growth:** seberapa besar kemungkinan masalah tersebut akan berkembang atau memburuk jika tidak segera diselesaikan, terkait dengan tingkat perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Untuk menerapkan metode USG, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi.
- Memberikan skor untuk setiap masalah berdasarkan kriteria urgency, seriousness, dan growth dengan menggunakan skala 1-5 atau 1-10. Skor 1 berarti rendah dan skor 5 atau 10 berarti tinggi.
- Menghitung total skor untuk setiap masalah dengan menjumlahkan skor urgency, seriousness, dan growth.
- Menyusun urutan prioritas masalah berdasarkan total skor tertinggi ke terendah.

Contoh penerapan metode USG dapat dilihat pada tabel berikut:

Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total
Masalah A	5	3	2	10
Masalah B	4	4	4	12
Masalah C	3	5	5	13
Masalah D	4	4	6	14
Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total

Tabel 2.1
Penilaian Prioritas menggunakan Metode USG

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa prioritas masalah adalah sebagai berikut:

- Masalah D
- Masalah C

- Masalah B
- Masalah A

Pengumpulan data yang penulis gunakan untuk kegiatan implementasi adalah dengan menggabungkan metode RRA dengan USG, melalui langkah-langkah berikut:

- Pertama, lakukan RRA untuk memahami kondisi dan masalah yang ada di pedesaan dengan cara berkomunikasi langsung dengan Mentor dan Stakeholder secara informal dan mengambil data menggunakan instrumen pengumpulan data.
- Kedua, menggunakan metode USG untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan tiga kriteria: urgency (seberapa mendesak), seriousness (seberapa serius), dan growth (seberapa besar kemungkinan berkembang atau memburuk). Diberikan skor untuk setiap masalah berdasarkan ketiga kriteria tersebut dengan menggunakan skala 1-5 atau 1-10. Kemudian, jumlahkan skor untuk setiap masalah dan susun urutan prioritas dari yang tertinggi ke terendah.
- Ketiga, buat rencana aksi untuk menyelesaikan masalah-masalah prioritas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait.

BAB III

RANCANGAN IMPLEMENTASI PENGGERAKKAN MASYARAKAT

3.1. Rancangan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahapan	Output
1	Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data	Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder	Mentor dan Stakeholder memahami tujuan implementasi sehingga dapat memberikan saran dan dukungan agar implementasi berjalan dengan baik
		Membuat dan menguji coba <i>Google Form</i> yang sudah dibuat	Link <i>Google Form</i> yang siap digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan implementasi
2	Pengumpulan Data	Sosialisasi Instrumen Pengumpulan Data	Tersampainya pemahaman materi sosialisasi sehingga Stakeholder paham pengisian link <i>Google form</i> dan tujuan dari proses pengumpulan data
		Monitoring Pengumpulan Data	Bahan olahan data
3	Analisis Data	Mengolah data yang diperoleh	Hasil pengolahan data
4	Evaluasi	Melakukan konsultasi terkait hasil pengolahan data	Saran dan Masukan dari Mentor dan Stakeholder
		Menyusun Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat	Laporan Implementasi Penggerakkan Masyarakat

Tabel 3.1
Matriks Rancangan Kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat

3.2. Rencana Jadwal

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER																OKTOBER							
		7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	29	2	3	4	5	6	9	10	
1.	Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data																								
1.1.	Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder																								
1.2.	Membuat dan menguji coba <i>Google Form</i> yang sudah dibuat																								
2.	Pengumpulan Data																								
2.2.	Sosialisasi Instrumen Pengumpulan Data																								
2.2.	Monitoring Pengumpulan Data																								
3.	Analisis Data																								
3.1.	Menganalisis Data yang diperoleh																								
4.	Evaluasi																								
4.1.	Konsultasi terkait hasil pengolahan data																								
4.2.	Menyusun Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat																								

Tabel 3.2
Rencana Jadwal Kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat

3.3. Kendala dan Antisipasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Kendala yang Mungkin Terjadi	Antisipasi Menghadapi Kendala
1	Persiapan	Konsultasi dengan mentor	Tidak tercapainya visi dan misi sesuai tujuan awal perencanaan Implementasi Penggerakkan Masyarakat	• Samakan persepsi sebelum melakukan pertemuan • Buat daftar hal-hal yang akan didiskusikan dan juga point penting terkait tujuan kegiatan
		Koordinasi dengan Stakeholder		
		Proses pembuatan instrumen pengumpulan data	Instrumen kurang tepat	Pilot project beberapa sampling pengambilan data
2	Survei dan Pengumpulan Data	Melakukan survei lapangan	• Pihak yang dikunjungi tidak dapat ditemui • Narasumber memberikan informasi yang tidak valid	• Koordinasi dengan stakeholder setempat • Cross check dengan pemerintah daerah setempat
		Mewawancarai stakeholder		
3	Analisis Data	Menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data	Terdapat kekurangan data Data tidak valid	• Pilot project beberapa sampling pengambilan data • Cross check dengan pemerintah daerah setempat
4	Evaluasi	Menyusun rencana aksi penggerakkan masyarakat	Rencana aksi tidak mendapat dukungan dari stakeholder	Sering koordinasi dan komunikasi
		Menyusun laporan aktualisasi	Laporan tidak selesai tepat waktu	Ikuti timeline dengan baik

Tabel 3.3
Kendala dan Antisipasi Kegiatan Implementasi Penggerakkan Masyarakat

BAB IV

LAPORAN IMPLEMENTASI PENGGERAKKAN MASYARAKAT

4.1. Jadwal Implementasi Kegiatan

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	PARAF MENTOR
1	7 - 14 September 2023	Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM	Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder	Mentor dan Stakeholder memahami tujuan implementasi sehingga dapat memberikan saran dan dukungan agar implementasi berjalan dengan baik	
2	15 - 18 September 2023	Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM	Membuat dan menguji coba <i>Google Form</i> yang sudah dibuat	Link <i>Google Form</i> yang siap digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan implementasi	
3	19 September 2023	Pengumpulan Data UMKM	Sosialisasi Instrumen Pengumpulan Data	Tersampainya pemahaman materi sosialisasi sehingga Stakeholder paham pengisian link <i>Google form</i> dan tujuan dari proses pengumpulan data	
4	20 - 27 September 2023	Pengumpulan Data UMKM	Monitoring Pengumpulan Data	Bahan olahan data berdasarkan hasil pengumpulan data	
5	29 September – 3 Oktober 2023	Analisis Data	Mengolah data yang diperoleh	Hasil pengolahan data menggunakan Ms Excel	
6	4 – 6 Oktober 2023	Evaluasi	Melakukan konsultasi terkait hasil pengolahan data	Saran dan Masukan dari Mentor dan Stakeholder terkait Rekomendasi Kegiatan Penggerakkan Masyarakat	
7	9 – 10 Oktober 2023	Evaluasi	Menyusun Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat	Laporan Implementasi Penggerakkan Masyarakat	

Tabel 4.1
Jadwal Implementasi Kegiatan Penggerakkan Masyarakat

4.2. Deskripsi Implementasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan implementasi direalisasikan sesuai dengan rancangan implementasi yang telah dibuat. Kegiatan implementasi ini dilaksanakan mulai tanggal 7 September 2023 hingga 10 Oktober 2023, pelaksanaan dilakukan dalam 5 minggu. Dalam pelaksanaan kegiatan implementasi ini terdapat 4 kegiatan yang telah dirancang sebelumnya sebagai langkah-langkah Implementasi Penggerakan Masyarakat dengan tahapan – tahapan yang sudah berurutan. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan yang telah penulis laksanakan adalah sebagai berikut.

4.2.1. Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM

Kegiatan pertama dalam Implementasi Penggerakan Masyarakat ini adalah tahap Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 18 September 2023, adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menghasilkan link Google Form yang siap digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan implementasi, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder

Tahap pertama dalam kegiatan Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan stakeholder. Tujuan dari kegiatan konsultasi dan koordinasi ini adalah Mentor dan Stakeholder memahami tujuan implementasi sehingga dapat memberikan saran dan dukungan agar implementasi berjalan dengan baik secara bertanggung jawab. Dalam melakukan diskusi diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik agar informasi yang disampaikan dapat dipahami. Penulis menghargai setiap saran dan masukan yang diberikan mentor maupun stakeholder. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah persetujuan serta saran dan masukan dari mentor dan stakeholder. Stakeholder terkait dalam kegiatan ini adalah Perangkat Desa Bojonggede (seksi Kesra atau ekbang) dan Forum UMKM Desa dan Kecamatan.



Gambar 4.1 Mentoring Bersama Kepala Seksi dan Rekan Kerja



Gambar 4.2 Koordinasi Bersama Stakeholder (Perangkat Desa dan Forum UMKM)

b. Membuat dan Menguji Coba *Google Form* yang Sudah Dibuat

Tahap kedua dalam kegiatan Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data UMKM adalah membuat dan menguji coba *Google Form* yang sudah dibuat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui kekurangan dari instrumen yang telah dibuat sehingga bisa disempurnakan dengan menjadikan bahan evaluasi hasil uji untuk memperbaiki layanan. Penulis memberikan kualitas diri yang terbaik untuk memperbaiki atau mengantisipasi hasil uji coba yang telah dilakukan. Juga mengadopsi trend dan kemajuan teknologi sebagai bentuk antisipasi permasalahan pada saat ujicoba. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Instrumen pengumpulan data digital dalam bentuk *Google Form* yang akan diberikan kepada UMKM seluruh Desa Bojonggede untuk diisi dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PERTANYAAN GOOGLE FORM	
1	Email Address
2	KECAMATAN
3	NAMA UMKM / NAMA USAHA
4	TAHUN MULAI BERDIRI
5	BENTUK USAHA
6	JENIS USAHA
7	JENIS USAHA (UNTUK CEKLIS LAINNYA)
8	NAMA PENGUSAHA
9	TEMPAT LAHIR / TANGGAL LAHIR (PERHATIKAN PENGISIAN)
10	PENDIDIKAN
11	ALAMAT SESUAI KTP
12	ALAMAT USAHA
13	NOMOR NIK
14	NOMOR KONTAK HP (DIUTAAMAKAN YANG BISA WHATSAAP)
15	PRODUK YANG DIHASILKAN
16	EMAIL (isi menggunakan huruf kecil atau sesuai dengan alamat email)
17	ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM USAHA
18	STATUS TEMPAT USAHA
19	USAHA YANG DIJALANKAN
20	PERKEMBANGAN USAHA
21	DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI (PKP, WUB, Halal, Desain Kemasan, atau kosongkan jika belum)
22	PAMERAN YANG PERNAH DIIKUTI (kosongkan jika belum pernah)
23	LEMBAGA INSTANSI YANG MEMBINA
24	NOMOR NIB/IUMK
25	MODAL PERTAMA SENDIRI (isi dengan nominal)
26	MODAL SEKARANG SENDIRI (isi dengan nominal)
27	ASET SEKARANG (isi dengan nominal)
28	TOTAL ASET / KEKAYAAN SEKARANG (isi dengan nominal)
29	OMZET/TAHUN PERTAMA (isi dengan nominal)
30	OMZET/TAHUN SEKARANG (isi dengan nominal)
31	MODAL LUAR
32	KETERANGAN
33	TANGGAL LAHIR
34	JUMLAH MODAL LUAR (untuk yang ceklis ada)
35	MODAL PERTAMA DARI LUAR (isi jika ada dengan nominal)
36	ASET PERTAMA (isi dengan nominal)
37	OMZET/TAHUN PERTAMA (isi dengan nominal)
38	MODAL SEKARANG DARI LUAR (isi jika ada dengan nominal)

Gambar 4.3 Daftar Pertanyaan Google Form

4.2.2. Pengumpulan Data UMKM

Kegiatan kedua dalam Implementasi Penggerakkan Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 27 September 2023, adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menghasilkan sekumpulan bahan data yang akan diolah sebagai dasar dari rekomendasi yang siap digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan implementasi, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Instrumen Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan sosialisasi instrumen pengumpulan data. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah tersampainya pemahaman materi sosialisasi sehingga Stakeholder paham menggunakan instrumen pengisian data yang berbentuk Google Form.

Dampak jika sosialisasi tidak berjalan dengan harmonis dan kolaboratif adalah kemungkinan ada stakeholder yang masih belum memahami pengisian dari *google form* sehingga data yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.



Gambar 4.4 Sosialisasi Instrumen Pengumpulan Data

b. Monitoring Pengumpulan Data

Tahap kedua dalam kegiatan pengumpulan data adalah monitoring pengumpulan data atau mengamati hasil dari penggunaan instrumen pengolahan data. Tujuan dari kegiatan monitoring pengumpulan adalah untuk memastikan data hasil pelaporan sesuai harapan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah adanya ketersediaan data hasil olahan dari penginputan yang dilakukan oleh UMKM yang dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan pemberian rekomendasi sesuai dengan tujuan Implementasi Penggerakkan Masyarakat.

Dampak jika hasil penggunaan instrumen tidak diamati dengan akuntabel dan kompeten adalah hasil dari penginputan tidak dapat

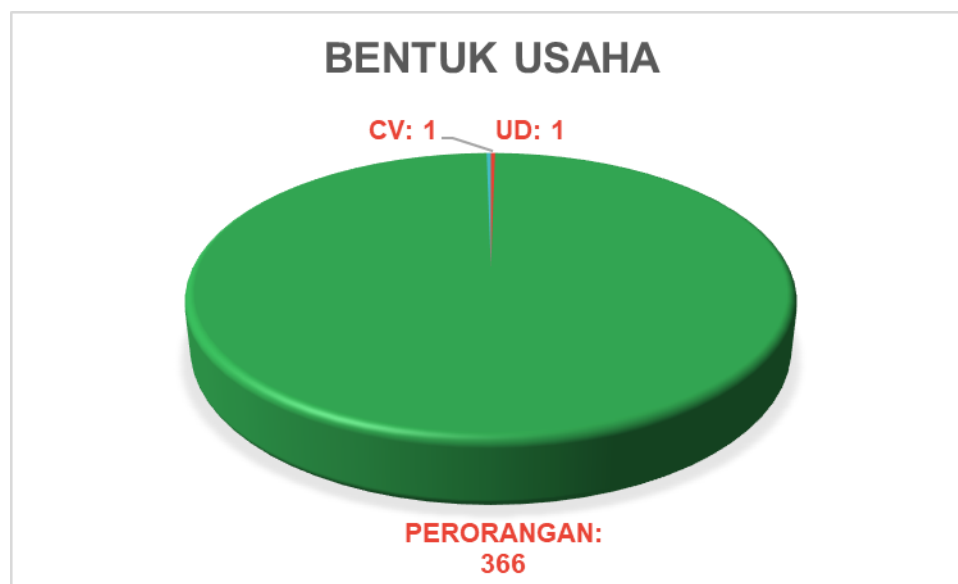
termanfaatkan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dari diadakannya implementasi ini.



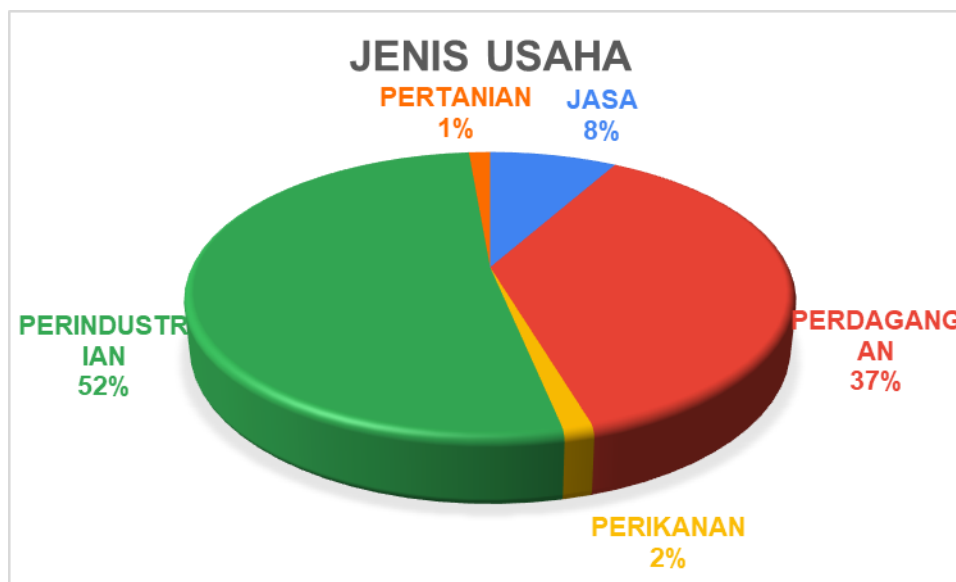
Gambar 4.5 Proses Monitoring Pengumpulan Data

4.2.3. Analisis Data

Kegiatan Ketiga dalam Implementasi Penggerakan Masyarakat ini adalah Analisis Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Dilaksanakan pada tanggal 29 September – 3 Oktober 2023. Data diolah menggunakan Aplikasi Microsoft Excel dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi bersama Mentor dan Stakeholder.



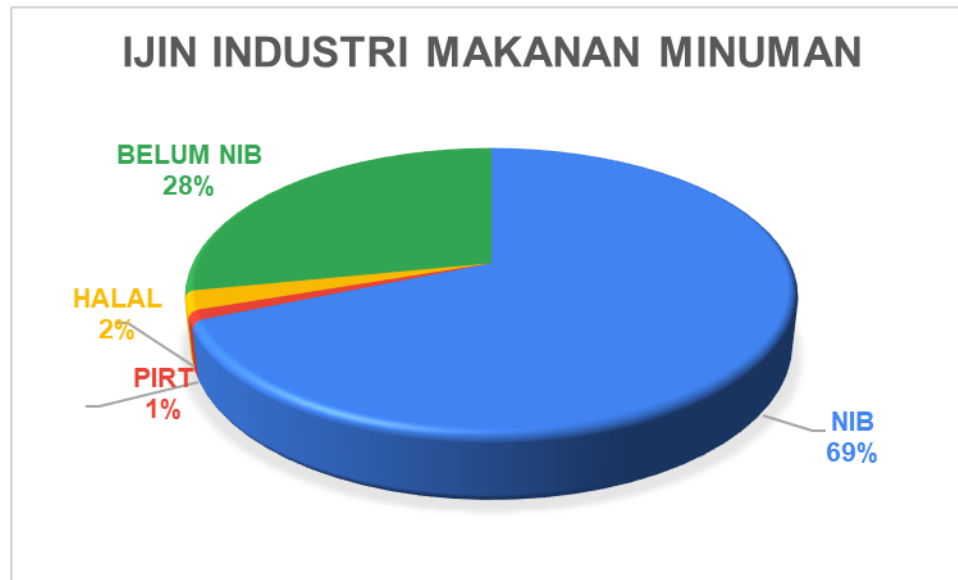
Gambar 4.6 Grafik Bentuk Usaha Di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor



Gambar 4.7 Grafik Jenis Usaha Di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor



Gambar 4.8 Grafik Jenis Usaha Perindustrian Di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor



Gambar 4.9 Grafik Ijin Industri Makanan Minuman Di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

4.2.4. Evaluasi

Kegiatan keempat dalam Implementasi Penggerakan Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 4 – 10 Oktober 2023, adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sesuai rencana dan tersusunnya laporan implementasi, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Melakukan Konsultasi Hasil Pengolahan Data

Tahap pertama dalam evaluasi kegiatan adalah melakukan konsultasi dan koordinasi hasil pengolahan data dengan mentor dan stakeholder. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyampaian kesimpulan dari olahan data sehingga didapatkan rekomendasi yang akan digunakan sebagai hasil akhir dari rangkaian proses implementasi. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersampainya laporan akhir dari kegiatan aktualisasi serta mendapatkan masukan dan arahan untuk penyempurnaan kegiatan.

Dampak jika evaluasi kegiatan tidak dilakukan dengan akuntabel dan kompeten adalah adanya kemungkinan rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan dari diadakannya implementasi.



Gambar 4.10 Konsultasi dan Koordinasi Bersama Internal Kecamatan



Gambar 4.11 Konsultasi dan Koordinasi Bersama Stakeholder

b. Menyusun Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat

Tahap kedua dalam evaluasi kegiatan adalah menyusun rencana aksi penggerakkan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyampaian hasil akhir dari rangkaian proses implementasi dalam bentuk laporan. Rekomendasi Rencana Aksi Penggerakkan Masyarakat merupakan hasil akhir dalam implementasi ini.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya laporan akhir dari kegiatan implementasi serta pemanfaatan dari data yang diolah dari hasil pengumpulan data oleh para stakeholders.

Dampak jika laporan aktualisasi tidak dilakukan dengan akuntabel dan kompeten adalah hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan rancangan implementasi kegiatan serta ada kemungkinan laporan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.



Gambar 4.10 Konsultasi dan Koordinasi Bersama Internal Kecamatan

4.3. Hasil Implementasi Kegiatan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 20 – 27 September 2023, sebanyak 368 UMKM yang ada di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor sudah terdata dengan mengisi Link Google Form yang diberikan. Dari 368 UMKM yang mengisi link Google Form, hampir 100 persen (366 UMKM) merupakan usaha perorangan, sedangkan sisanya berbentuk CV (1 UMKM) dan UD (1 UMKM).

Berdasarkan jenis usahanya, sebanyak 52% (191 UMKM) merupakan Usaha Perindustrian, Usaha perindustrian adalah suatu usaha terencana untuk mengelola bahan organik dengan sistem mekanik maupun kimia, sehingga menjadi produk bernilai jual yang lebih tinggi. Jenis-jenis usaha perindustrian yang ada di Desa Bojonggede terdiri dari industri rumah tangga dan industri ringan. Industri rumah tangga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri bahan pangan dan industri kerajinan. Contoh industri rumah tangga adalah produksi kerupuk, makanan ringan, tempe, tahu, kecap dan lain-lain. Sedangkan industri kerajinan yaitu tenun, batik, ukir-ukiran, anyaman, dan lain-lain. Industri ringan adalah industri yang didominasi oleh usaha tekstil seperti industri sepatu dan bahan pakaian.

Jenis usaha Perdagangan pun banyak digeluti oleh UMKM Desa Bojonggede, yaitu sebanyak 37% (137 UMKM). Usaha perdagangan adalah suatu kegiatan yang sifatnya melakukan jual-beli antara pedagang dan pembeli. Barang yang dijual dari pedagang ini berwujud, yang berarti kita dapat memindahkan kepemilikan barang tersebut. Usaha perdagangan juga mengutamakan keuntungan dari penjualan dagangannya. Keuntungannya tersebut dapat dijadikan lagi sebagai modal, biaya distribusi, dan biaya operasional. Dalam menjalankan usaha perdagangan ini,

diperlukan strategi agar usaha meroket dan tetap bertahan menghadapi persaingan pasar. Peluang usaha adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam usaha perdagangan ini. Selain itu juga persaingan, pelayanan terhadap konsumen, dan kualitas barang juga merupakan hal yang penting dalam berdagang. Jenis-jenis usaha perdagangan yang ada di Desa Bojonggede, yaitu:

1. Usaha dagang adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali (berdagang) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual.
2. Usaha distribusi adalah kegiatan memasarkan produk-produk tertentu dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi tertentu.
3. Usaha retail adalah usaha yang menjual barang secara langsung kepada konsumen akhir.
4. Usaha grosir adalah usaha yang menjual barang dalam jumlah besar kepada pengecer atau pedagang lainnya.
5. Usaha franchise adalah bentuk kerjasama antara pemilik merek dagang (franchisor) dengan pihak lain (franchisee) untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dagang milik franchisor.

Implementasi Penggerakkan Masyarakat kali ini memfokuskan kegiatan pada Industri makanan dan minuman yang menempati posisi paling banyak digeluti oleh UMKM di Desa Bojonggede. Dengan harapan, pemberdayaan yang dilakukan di industri terbesar yang ada di Desa Bojonggede dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Bojonggede. UMKM dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah di desa dengan cara:

1. Meningkatkan pendapatan: UMKM dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan memberikan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat setempat.
2. Memberdayakan masyarakat: UMKM dapat membantu memberdayakan masyarakat desa, terutama perempuan, dengan memberikan kesempatan untuk berwirausaha dan memperoleh pengalaman dalam mengelola usaha.

3. Mengembangkan potensi masyarakat: UMKM dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat desa dengan memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas.
4. Mempererat rasa kebersamaan: UMKM dapat membantu mempererat rasa kebersamaan antarwarga desa melalui kerjasama dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan hasil pendataan dan survei lapangan yang dilakukan oleh penulis, Desa Bojonggede memiliki UMKM potensial berupa usaha yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Namun dalam kegiatan pemasaran pelaku usaha masih melakukan secara konvensional seperti dititipkan pada toko maupun menerima pesanan dari pihak tertentu, dan dalam pemanfaatan strategi branding juga belum optimal. Sehingga lingkup pemasaran masih terbatas menjadikan usaha yang dijalankan belum dapat berkembang dengan baik. Sebagian besar usaha dilakukan pada bidang industri makanan minuman dengan jenis yang variatif.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Industri Makanan Minuman yang ada di Desa Bojonggede dalam pengembangan usahanya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk.

Selain itu, perijinan juga masih menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan prioritas. Bagi industri makanan minuman, Izin usaha bagi industri makanan dan minuman memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM. Izin paling dasar yang wajib dimiliki oleh usaha adalah NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas milik pengusaha yang diterbitkan oleh lembaga penyedia sistem OSS (BPKM). NIB terdiri dari 13 digit angka, tanda tangan elektronik, dan pengaman. NIB dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanaan. NIB memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan bisnis. Berdasarkan data diperoleh informasi bahwa 28% UMKM makanan dan minuman di Desa Bojonggede tidak memiliki NIB.

Dalam konteks UMKM makanan dan minuman, izin usaha dapat membantu perkembangan UMKM dengan cara:

1. Meningkatkan daya saing produk UMKM: Dengan adanya izin edar BPOM, produk UMKM akan lebih terjamin keamanannya sehingga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasaran.
2. Memperluas pasar: Dengan adanya izin usaha, UMKM dapat memperluas pasar dengan memberikan kepastian hukum atas produk yang dihasilkan.
3. Meningkatkan kualitas produk: Dalam proses pengajuan izin usaha, perusahaan akan melalui proses penilaian terhadap kualitas produknya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu cara untuk mendukung penguatan ketahanan ekonomi di desa. Berikut adalah beberapa contoh pemberdayaan UMKM yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan kualitas produk: UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka agar lebih kompetitif di pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki desain produk, meningkatkan kualitas bahan baku, dan meningkatkan proses produksi.
2. Meningkatkan akses pasar: UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dengan cara memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan marketplace online. Selain itu, UMKM juga dapat berpartisipasi dalam pameran atau bazar untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.
3. Meningkatkan keterampilan: UMKM dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola bisnis dengan mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
4. Meningkatkan akses keuangan: UMKM dapat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah dengan mengajukan pinjaman modal melalui program-program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
5. Bekerjasama dengan pelaku usaha lain: UMKM dapat menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain di desa untuk saling mendukung dan memperkuat ekosistem bisnis di desa.

Beberapa hal yang menjadi isu berdasarkan hasil analisis data implementasi diuraikan ke dalam tabel USG untuk dapat ditemukan isu prioritas yang akan dijadikan rekomendasi penggerakkan masyarakat sebagai hasil akhir dari implementasi.

NO	ISU	KRITERIA			TOTAL	PERINGKAT
		U	S	G		
1	Pemasaran	5	3	4	12	1
2	Keuangan	4	3	4	11	2
3	Izin Usaha	3	3	3	9	4
4	Operasional	3	3	4	10	3

Tabel 4.1 Analisis dengan Teknik USG

Berdasarkan analisis menggunakan teknik USG seperti di atas, maka yang terpilih sebagai isu prioritas adalah pemasaran UMKM. Menanggapi isu pemasaran UMKM, penulis memberikan rekomendasi penggerakkan berupa "Digitalisasi Pemasaran UMKM". Digitalisasi Pemasaran UMKM merupakan salah satu kegiatan peningkatan keterampilan UMKM dalam mengelola bisnis dengan mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Juga dapat memperluas jangkauan akses pasar.

Ada beberapa platform digital yang dapat membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka, di antaranya:

1. Media sosial: Platform ini sangat digemari oleh para pelaku bisnis UMKM untuk berjualan karena mudah dan praktis. Selain itu, kamu tidak perlu mengeluarkan modal sama sekali ketika mulai berjualan.
2. Marketplace: Marketplace adalah platform yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli di internet. Saat ini, banyak platform marketplace yang bisa dipilih oleh pemilik UMKM untuk mulai berjualan secara online.

Digitalisasi membuka peluang UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kehadiran media sosial dan situs web dapat meminimalkan kendala pemasaran bagi usaha kecil. Pelaku UMKM pun dapat melakukan promosi dengan lebih mudah dan menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, digitalisasi produk UMKM diharapkan mampu menunjang masing-masing sektor UMKM untuk berlomba-lomba dalam melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan sektor lainnya. Lebih lanjut, digitalisasi UMKM dapat mempercepat proses transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, yang bisa membuat UMKM dapat bersaing di ranah Internasional.

Lebih jauh lagi, digitalisasi juga membawa beberapa keuntungan bagi pelaku UMKM, di antaranya:

1. Menjangkau pasar lebih luas: Digitalisasi membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka.
2. Lebih profesional: Dengan go digital, banyak pelaku UMKM jadi beromzet cukup tinggi setelah go digital. Hal ini karena digitalisasi membuat bisnis mereka terlihat lebih profesional.
3. Menekan biaya operasional: Digitalisasi juga dapat membantu pelaku UMKM dalam menghemat biaya operasional mereka.
4. Dapat mengatur bujet pemasaran: Dengan adanya platform digital, pelaku UMKM dapat mengatur bujet pemasaran mereka dengan lebih efektif dan efisien.

4.4. Kendala dan Solusi

Selama proses implementasi, tidak terdapat kendala berarti karena sudah ada antisipasi dari estimasi kendala yang sudah disampaikan pada saat membuat Rancangan Implementasi. Diantaranya adalah:

1. Ketidaksamaan persepsi terkait tujuan implementasi sudah diantisipasi melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi bersama mentor dan stakeholder sehingga semua pihak yang terlibat memiliki visi dan misi yang sama dan juga mendukung terhadap adanya kegiatan implementasi ini.

2. Ketidakmampuan UMKM untuk mengisi link Google Form sebagai instrumen pengumpulan data sudah diantisipasi dengan adanya sosialisasi penggunaan dan pengisian link google form.
3. Data yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan atau tidak berupa data yang sebenarnya sudah diantisipasi melalui kegiatan monitoring pengumpulan data dan konsultasi hasil pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan implementasi, setiap tahapan kegiatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan implementasi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisisioner yang dianalisis melalui metode USG.

Laporan implementasi ini dirasa sangat penting untuk menjadi solusi dari isu permasalahan yang ada di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede terkait Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui Digitalisasi Pemasaran UMKM. Digitalisasi pemasaran UMKM dapat mendukung peningkatan ketahanan ekonomi dengan cara memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan mempercepat transformasi perilaku konsumen.

Digitalisasi membuka peluang UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kehadiran media sosial dan situs web dapat meminimalkan kendala pemasaran bagi usaha kecil. Pelaku UMKM pun dapat melakukan promosi dengan lebih mudah dan menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, digitalisasi produk UMKM diharapkan mampu menunjang masing-masing sektor UMKM untuk berlomba-lomba dalam melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan sektor lainnya. Lebih lanjut, digitalisasi UMKM dapat mempercepat proses transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, yang bisa membuat UMKM dapat bersaing di ranah Internasional.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Digitalisasi UMKM dalam memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan mempercepat transformasi perilaku konsumen dapat dilakukan melalui (1) Digitalisasi pemasaran UMKM, (2) Pendampingan manajemen keuangan, (3) Penyuluhan dan pendampingan pembuatan izin usaha, (4) Pendampingan manajemen operasional, dengan pemanfaatan media sosial dan situs web berbasis internet.

Digitalisasi pemasaran UMKM dapat ditingkatkan ketajaman fungsinya guna memperoleh manfaat lebih besar dapat dilakukan dengan diawali serangkaian kegiatan yang dilakukan pemilik usaha UMKM yaitu (1) Riset pasar sebelum mengelola produk untuk mengetahui produk yang dibutuhkan oleh konsumen, (2) Riset kompetitor terkait pengelolaan produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, (3) Promosi brand/logo/merk sehingga dikenal banyak konsumen melalui media yang banyak digunakan oleh konsumen.

Berdasarkan alternatif solusi yang penulis sampaikan, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dilanjutkan dengan Pendampingan Pemasaran melalui media sosial dan situs web selama kurang lebih satu bulan. Selain itu kegiatan implementasi ini juga akan dilakukan di satu kelurahan dan 8 desa lainnya yang ada di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Depari, Adnan Sembiring dan Sartono. (2021) *Identifikasi Kebutuhan Penggerakan*. Jakarta: Puslat Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Depari, Adnan Sembiring. (2021). *Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat*. Puslat Pegawai ASN. Jakarta: Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Noernaith, Rosita. (2021). *Pelebagaan Nilai-Nilai Masyarakat*. Puslat Pegawai ASN. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Darah Teringgal dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) No. 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- Ratna, Sri. (2021) *Fasilitasi Pelatihan*. Jakarta: Puslat Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Respati, Hari Kartiko. (2021) *Fasilitasi Pendampingan*. Jakarta: Puslat Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sarwono, Bambang dan Sri Sumaryanti. (2021) *Manajemen Konflik*. Jakarta: Puslat Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sarwono, Bambang. (2021) *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Puslat Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Trisianti, Hesty. (2021) *Fasilitasi Penyuluhan*. Jakarta: Puslat Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Wiryatiningsih, Endang. (2021). *Jejaring dan Kemitraan*. Puslat Pegawai ASN. Jakarta: Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.